

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah merupakan badan atau lembaga penyelenggaran pemerintahan daerah untuk mengatur suatu daerah tertentu. Pemerintah mempunyai tujuan bukan untuk mencari sebuah keuntungan atau Profit tapi semata-mata bagaimana suatu daerah dapat mensejahterkan masyarakatnya seecara adil tanpa adanya diskriminasi terhadap masyarakat atau beberapa golongan. Misalnya peningkatan keamanan, kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan perekonomian masyarakat yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Semakin baik perekonomian masyarakat tentunya akan berpengaruh terhadap realisasi pendapatan yang akan dicapai, sehingga dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintah daerah sesuai dengan hasil yang telah di capai. Oleh sebab itu, masyarakat di tuntut untuk lebih berfikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan pemerintah daerah. Hal ini di maksudkan untuk mngetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD yang baik, secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan, Pembanguann daerahnya dan pelayanan kepada masyarakat. Ciri dari suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu kemampuan keuangan daerah, yang artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahanya.

Pemerintah daerah dalam menjalankan otonom daerah, dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efesien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2005. Perubahan menjadi peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat serta dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang di wujudkan dalam anggaran. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama ini sulit untuk dilakukan secara objektif. Kesulitan ini disebabkan belum disusunnya sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dari sebuah organisasi atau entitas pada satu periode. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dengan anggaran yang telah ditetapkan menilai kondisi keuangan mengevaluasi, efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja merupakan sebuah proses dalam menilai atau mengukur kegiatan yang dilaksanakan apakah telah sesuai dengan apa yang direncanakan dan telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja umumnya dimulai dengan penetapan indikator dalam memberikan suatu informasi yang memungkinkan organisasi sektor publik dapat memonitor kinerjanya dalam menghasilkan suatu output dan outcome bagi masyarakat. Pengukuran kinerja sangat penting dalam menilai akuntabilitas pemerintah daerah atau suatu organisasi dalam menghasilkan kinerja yang optimal.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Hal ini diperlukan untuk memastikan tercapainya pengeluaran yang tidak melebihi anggaran dan kegiatan yang direncanakan telah mencapai sasaran.

Tuntutan akan kualitas, profesionalitas dan kinerja pemerintah daerah dapat di nilai dengan konsep *Value For Money* (Nilai Daripada Uang) dalam menjalankan aktivitasnya. *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor

publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). Prinsip *Value For Money* dalam rangka pengukuran kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahannya yang bertumpu pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang baik. Masyarakat membutuhkan pelayanan public yang baik dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang di miliki dengan tanggung jawab yang di berikan masyarakat yang dilayani.

Model *Value For Money* atau yang dikenal dengan model 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas), mengukur dengan analisis varian yakni membandingkan antara *input* dan *output* yang direncanakan dengan *input* dan *output* aktualnya. Ekonomi diukur melalui rasio antara masukan aktual dengan masukan rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi aktual dengan rasio efisiensi yang direncanakan. Efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran realisasian (aktual) dengan keluaran menurut rencana (Mardiasmo, 2002).

*Value For Money* tedalam konteks otonomi daerah merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana public (*public money*) yang mendasarkan konsep *Value For Money*, Pengelolaan dana public tentunya dilakukan oleh pemerintah daerah oleh karena itu perlu adanya indikator untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep *value for money* untuk menilai kinerja pemerintah daerah khususnya di Tana Luwu.

Tana Luwu terdapat banyak potensi sumber daya alamnya yang apabila dikelola dengan baik tentu akan berdampak pada perekonomian masyarakat dan kemajuan dari Tana Luwu. Dari kekayaan sumber daya alam dan pendapatan yang di pungut oleh pemerintah daerah tentunya harus berbanding lurus dengan kinerja dari pemerintah daerah oleh karena itu perlu adanya pengukuran sejauh mana pemerintah daerah dalam mengelola anggaran yang di dapatkan dari pendapatan baik itu dari masyarakat berupa apajak dan retribusi ataupun sumber dana bantuan dari pemerintah pusat sehingga adanya pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Pembangunan infrastruktur, dan perbaikan akses transportasi merupakan salah satu contoh dari kinerja pemerintah daerah dalam mengembangkan daerah, melihat banyaknya pembangunan dan perbaikan akses transportasi di Tana Luwu tentu menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah daerah telah melakukan kinerjanya dengan baik, apakah dana yang di pungut oleh pemerintah daerah sudah di gunakan untuk mensejahterakan masyarakat, apakah ada peningkatan kinerja pemerintah dari tahun ketahun. Pemerintah harus dapat mengetahui apa yang di inginkan masyarakat dan merealisasikannya semaksimal mungkin sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang akan berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah dan juga dapat mengembangkan potensi daerah melalui pendapatan daerah sehingga dapat meingkatkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah beserta jajarannya dapat bersinergi dengan masyarakat dan semua partner yang terkait dalam mensejahterakan masyarakat.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah menggunakan konsep *value for money* sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Sari, (2020) dalam judul penelitiannya yaitu analisis pengukuran kinerja pemerintah Daerah dengan prinsip *Value For Money* (studi kasus badan pengelola keuangan dan aset daerah kota medan) yang menunjukkan adanya penurunan kinerja pemerintah daerah dari tahun 2014 sampai 2018 berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayu (2020) dengan judul penelitian analisis pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip *Value For Money* pemerintah daerah kabupaten berau yang menunjukkan hasil yang efektif. Dari hasil penelitian tersebut terjadi adanya inkonsistensi atau hasil yang berbeda oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja pemerintah mengalami penurunan atau sebaliknya. Berangkat dari pemikiran seperti itulah peneliti tertarik untuk menilai kinerja pemerintah daerah khususnya di Tana Luwu menggunakan konsep *value for money*.

## **1.2 Rumusan masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah bagaimana konsep *Value For Money* dalam menilai kinerja pemerintah daerah di kabupaten/kota di Tana Luwu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah bagaimana mendiskripsikan dan menganalisis konsep *Value For Money* dalam menilai kinerja pemerintah

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan bahan penelitian dalam kajian dan secara teoritis mencoba menerapkan konsep *Value For Money* dalam penilaian kinerja pemerintah daerah

### **1.4.2 Manfaat praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Dapat mengetahui dan menambah wawasan dalam menilai kinerja pemerintah menggunakan konsep *Value For Money* serta mengimplementasikan ilmu yang di dapat di bangku perkuliahaan

#### **b. Bagi Pemerintah Atau Instansi**

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta saran terhadap konsep *Value For Money* dalam menilai kinerja pemerintah daerah

#### **c. Bagi Pembaca**

Dapat di jadikan sebagai referensi untuk menambah ilmu dan juga dapat mngetahui kinerja dari perintah daerah

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Konsep dasar yang menjadi tolak ukur dari penelitian yang akan dilakukan bagaimana *value for money* dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Mardiasmo (2009), Mengemukakan konsep *value for money* adalah suatu konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yakni ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Ekonomi yaitu pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input esteem yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input assets yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi yaitu pencapaian hasil yang ideal dengan input tertentu atas penggunaan input yang terendah untuk mencapai yield tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan hasil input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dan *income*

Hasil Penelitian yang terdahulu yang mendukung penelitian ini yaitu Sari (2020), Analisis pengukuran kinerja pemerintah Daerah dengan prinsip *Value For Money*. Hasilnya menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan

metode *Value For Money* yang diukur dengan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan.

Penelitian Rahmawati (2019), Pengukuran kinerja pemerintah daerah kabupaten sidoarjo dengan menggunakan prinsip *Value For Money*. Hasil penelitian pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2014 – 2018 tercatat memiliki Rasio Okonomis yang tidak stabil namun tetap ekonomis.

Penelitian Bayu (2020), Analisis pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip *Value For Money* pemerintah daerah kabupaten berau. Hasilnya dari penelitian ini menunjukkan rasio ekonomis dalam 6 tahun adalah rasio ekonomis, rasio efisiensi dalam 6 tahun efisien dengan fluktuasi, dan rasio efektivitas dalam 6 tahun itu sendiri dengan perubahan yang efektif

Penelitian Perdana (2020), Mengukur kinerja apbd kota surabaya analisis *Value For Money* Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga rasio yang diujikan menunjukkan performa yang baik.

## **2.2 Value For Money**

*Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*).

### **2.2.1 Definisi Value For Money**

*Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi

harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*).

*Value For Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep *Value For Money* pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan good governance. Implementasi konsep *Value For Money* dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik (Mardiasmo, 2009)

Berikut definisi dan pengertian *Value For Money* dari beberapa sumber buku:

1. Mardiasmo (2009), Mendefinisikan *Value For Money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yakni ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
2. Nordiawan, Deddi dan Hertianti, (2010), Mendefinisikan *Value For Money* adalah indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya.
3. Mahmudi, (2015), Mendefinisikan *Value For Money* adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *Value For Money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi.

4. Ardila, (2008), Mendefinisikan *Value For Money* adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga dapat diinjau dari non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik.

### **2.2.2 Konsep *Value For Money***

*Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor public yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

*Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah.

Konsep *Value For Money* untuk diimplementasikan pada pengukuran kinerja diperlukan pengembangan indikator kinerja. Pengukuran kinerja *Value For Money* dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam *Value For Money* berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomi dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif.

Konsep pokok *Value For Money* antara lain.

- a. Ekonomi yaitu pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
- b. Efisiensi yaitu pencapaian output yang optimal dengan input tertentu atas penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi

merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

- c. Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dan *income*

### **2.2.3 Indikator *Value For Money***

Tuntutan masyarakat dalam *Value For Money* adalah ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa penggunaan/pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Mardiasmo (2002), Menjelaskan indikator *Value For Money* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi). Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik. Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya.
- b. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena di satu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Atau di lain pihak sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan. Akan tetapi mungkin dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif dan efisien maka program yang dijalankan

dapat dikatakan *cost-effectiveness*. Indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektivitas dan dapat memberikan ukuran kinerja *bottom line* yang dalam sektor publik diidentikkan dengan pelayanan publik.

#### **2.2.4 Pengukuran *Value For Money***

langkah-langkah pengukuran *Value For Money* adalah sebagai berikut :

##### 1. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah (Mardiasmo, 2009). Mahmudi, (2015) mengartikan ekonomi sebagai perbandingan antara input sekunder (bahan baku, personel dan infrastruktur) dengan input primer (kas). Dalam organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu. Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada dibawah anggaran maka terjadi penghematan. Sedangkan sebaliknya, apabila diatas anggaran maka pemborosan.

Mardiasmo, (2009) menjelaskan rasio Ekonomi dapat di hitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja daerah}} \times 100 \%$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang di capai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah semakin baik

**Tabel 2. 1**  
**Kriteria ekonomis**

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

*Sumber:( Wayan Cipta 2014)*

## 2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan komponen dari konsep *Value For Money*, efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo, 2009). Ukuran efisiensi mengukur biaya atas output (*cost of output*). Ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output. Suatu organisasi dianggap efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu, semakin besar angkanya, semakin tinggi tingkat efisiensinya (Bastian, 2010).

Terkait dengan kemampuan mendayagunakan daya input pada tingkat output tertentu. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan, dengan menggunakan rasio efisiensi. Proses operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain (Mardiasmo, 2009) :

a. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama

- b. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan input
- c. Menurunkan input pada tingkat output yang sama
- d. Menurunkan input pada tingkat proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan output.

Mardiasmo, (2009) menjelaskan rasio Efisiensi dapat di hitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

**Tabel 2. 2**  
**Kriteria Efisiensi**

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60 - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

*Sumber:( Wayan Cipta 2014)*

### 3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut sudah berjalan dengan efektif. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (*cost of outcome*). Ukuran efektivitas merupakan refleksi output, Tujuan efektivitas harus spesifik, detail, dan terukur. Dalam mencapai tujuan, organisasi sektor publik sering kali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti ini bisa saja terjadi apabila efisiensi biaya bukan merupakan bagian dari indikator hasil (Bastian, 2009).

Mardiasmo, (2009) menjelaskan rasio Efektivitas dapat di hitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

**Tabel 2. 3**  
**Kriteria Efektivitas**

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber:( Wayan Cipta 2014)

### 2.2.5 Manfaat *Value For Money*

Manfaat *Value For Money* dalam pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Selain itu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

Menurut Mardiasmo, (2002) manfaat penerapan *Value For Money* bagi sektor publik dan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.

4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

### **2.3 Kinerja Pemerintah Daerah**

Bastian, (2006), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Dalam konteks pemerintah daerah, ke suksesan pemerintah daerah akan berdam pak pada kepercayaan dan dukungan public. Masyarakat akan menilai kesuksesan pemrintah daerah kinerjanya memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sedangkan Mahsun, (2006), mengartikan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam vital arranging suatu organisasi.

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan, kinerja pemerintah daerah merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi atau pemerintah dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

#### **2.3.1 Indikator Kinerja**

Bastian, (2006), menjeaskan indikator kerja merupakan suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif dimana menggambarkan dari nilai pencapaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Indikator kerja tersebut terdiri dari *inputs*,

*output, outcome benefits, dan impacts*. Dimana indikator tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
- b. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau nonfisik.
- c. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- d. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

### **2.3.2 Tujuan Pengukuran kinerja**

Mardiasmo, (2002), mengemukakan secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down dan bottom up*)
- b. Untuk mengukur kinerja *finansial* dan *non-finansial* secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*,

- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Sedangkan tujuan dilakukan pengukuran kinerja di sektor publik yang di jelaskan Mahmudi, (2015), adalah:

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi
- c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi.
- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishmen*. Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan reward, misalkan kenaikan

gaji, tunjangan, dan promosi, atau punishment, misalkan pemutusan kerja, penundaan promosi dan teguran

- e. Memotivasi pegawai. Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi
- f. Menciptakan akuntabilitas pegawai. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manjerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas.

### **2.3.3 Manfaat Pengukuran Kinerja**

Pemerintah daerah tidak lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi pemerintah daerah tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Sementara dari perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Berikut manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal pemerintah daerah Mahsun, (2006) :

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja
- b. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati

- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja
- d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah disepakati
- e. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif
- i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan
- j. Mengungkap permasalahan yang terjadi.

#### **2.3.4 Penilaian Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. (Mulyadi, 2004) menjelaskan penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penilaian kinerja merupakan suatu cara manajemen dalam menilai keefektivitasan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam sebuah anggaran. Penilaian kinerja ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai hasil kerja sehingga dapat membantu

manajer unit kerja dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Penilaian kinerja digunakan untuk menilai kemajuan pekerjaan atas pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, termasuk informasi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil dan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seseorang manajer atau pimpinan. Kegiatan penilaian ini penting, karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang kinerja mereka

Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme *reward* dan *punishment*. Sistem pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) digunakan sebagai pendorong bagi perencanaan strategi. Sistem penilaian kinerja dan mekanisme *rewards* dan *punishment* harus didukung dengan manajemen kompensasi yang memadai. Manajemen kompensasi merupakan mekanisme penting untuk mendorong dan memotifasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Insentif negatif jika tujuan tidak tercapai disebut hukuman (*punishment*). Peran penting adanya penghargaan (*reward*) dalam sebuah organisasi adalah untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi dan untuk menciptakan kepuasan bagi setiap individu.

Penilaian kinerja diperlukan untuk menentukan tingkat kontribusi individu

atau tingkat kinerja individu. Tiga perangkat kinerja yang paling populer untuk menilai kinerja yaitu:

- a. Hasil tugas individu, dengan menggunakan hasil tugas, maka seseorang pimpinan dapat menilai tinggi rendah kinerja pegawainya.
- b. Perilaku, dalam hal ini perilaku adalah kesegaran seseorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya.
- c. Ciri, dalam hal ini ciri adalah sikap baik, percaya diri, kooperatif, dapat diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya.

### **2.3.5 Kinerja Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan anjuran Pemerintah dalam UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 memberi arti penting bagi proses reformasi lembaga sektor publik di Indonesia. Kedua Undang-Undang tersebut memberi dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam rangka menciptakan good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Oleh karena itu dalam menjalankan tugas-tugas dan wewenang pemerintahan, Pemerintah Kabupaten/Kota di Tana Luwu sebagai pelaksana amanah mempunyai kewenangan untuk menata dan mengatur masyarakatnya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah adalah menjadi ulil amri, dan masyarakat juga diwajibkan mentaati segala yang diperintahkan.

Agama islam juga sangat memperhatikan mengenai amanah atas sebuah tanggung jawab yang diberikan. Dalam hal pemerintahan, islam mengharuskan bagi seseorang ataupun pemerintah yang diberikan amanah oleh orang lain untuk

mempertanggungjawabkannya. Tidak hanya kepada masyarakat, namun juga kepada Allah swt.

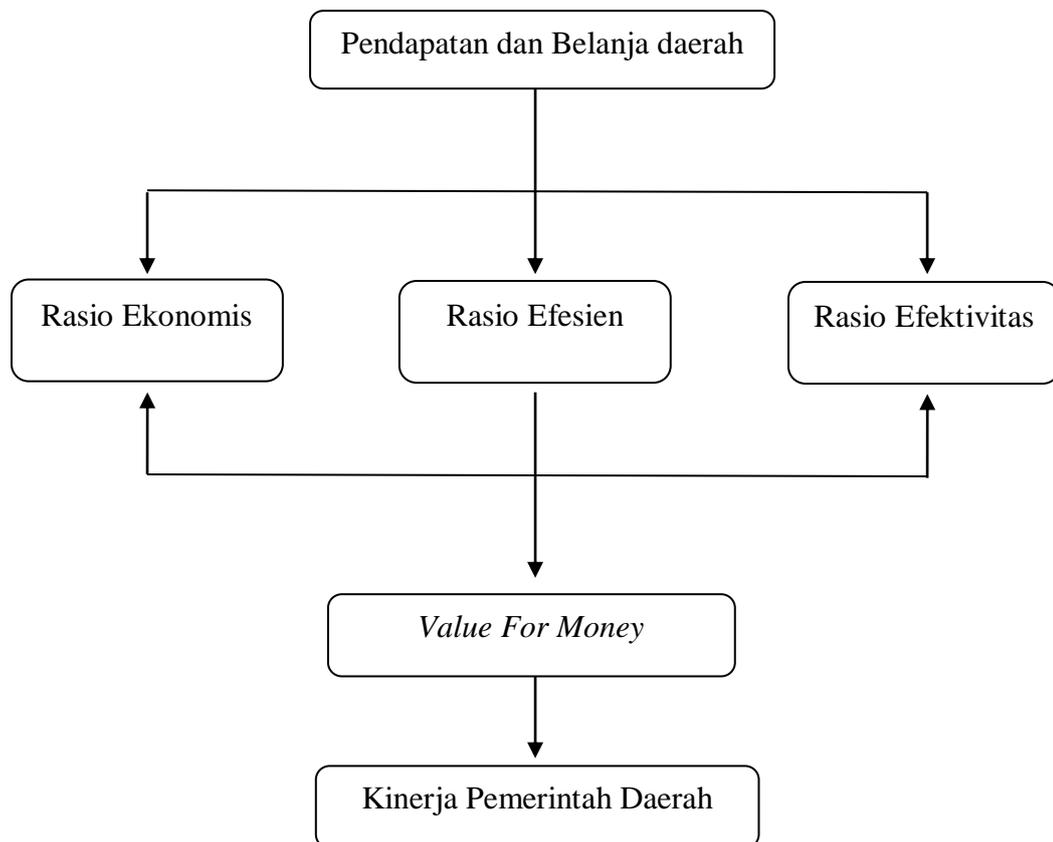
## 2.4 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sari, (2020)	Analisis pengukuran kinerja pemerintah Daerah dengan prinsip <i>Value For Money</i> (studi kasus badan pengelola keuangan dan aset daerah kota medan).	Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan metode <i>Value For Money</i> yang diukur dengan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan,
2	Rahmawati, (2019)	Pengukuran kinerja pemerintah daerah kabupaten sidoarjo dengan menggunakan prinsip <i>Value For Money</i>	pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2014 – 2018 tercatat memiliki Rasio Okonomis yang tidak stabil namun tetap ekonomis
3	(Perdana et al., 2020)	Mengukur kinerja apbd kota surabaya analisis <i>Value For Money</i>	Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga rasio yang diujikan menunjukkan performa yang baik.
4	Bayu& Andre,	Analisis pengukuran kinerja pemerintah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan rasio ekonomis

	(2020)	daerah menggunakan <i>Value For Money</i> pemerintah kabupaten berau	dengan prinsip daerah	dalam 6 tahun adalah rasio ekonomis, rasio efisiensi dalam 6 tahun efisien dengan fluktuasi, dan rasio efektivitas dalam 6 tahun itu sendiri dengan perubahan yang efektif.
--	--------	--	-----------------------	---

## 2.5 Kerangka Konseptual



**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**

## **2.6 Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan kerangka konseptual maka hipotesis yang diajukan didalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep *Value For Money* dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan kesimpulan yang jelas dan objektif terhadap masalah yang ada yaitu mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Tana Luwu dengan menggunakan metode *Value For Money*, yaitu dilihat dari segi ekonomis, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan subjek dari sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota di Tana Luwu yaitu terdiri dari 3 Kabupaten dan 1 kota diantaranya Kabupaten Luwu dengan ibu kota Belopa, Kota Palopo (otonom), Kabupaten Luwu Utara dengan ibu kota Masamba dan Kabupaten Luwu Timur dengan ibu kota Malili. Dalam hal ini peneliti membutuhkan waktu penelitian  $\pm 3$  (tiga) bulan.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pemerrintah daerah di Kabupaten/Kota di Tana Luwu.

### **3.3.2 Sampel**

Sampel adalah sebagian atau hasil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2007). Sampel dalam penelitian ini yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota di Tana Luwu Tahun 2018-2020.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang berupa angka-angka mengenai laporan anggaran dan realisasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Tana Luwu.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang diolah oleh pihak pemerintah dalam bentuk laporan-laporan dan dokumen- dokumen tertulis.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumentasi, dimana teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Tana Luwu Tahun 2016-2020 yang di perlukan oleh peneliti.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif yaitu untuk menghitung tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota di Tana Luwu berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

### 1. Rasio Ekonomis

Ekonomi berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Mardiasmo, (2009) menjelaskan rumus untuk mengukur tingkat ekonomis :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja daerah}} \times 100 \%$$

**Tabel 3. 1**  
**Kriteria Ekonomis**

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

*Sumber:( Wayan Cipta 2014)*

### 2. Rasio Efisien

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Mardiasmo, (2009) menjelaskan rumus untuk mengukur tingkat efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

**Tabel 3. 2**  
**Kriteria Efisiensi**

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60 - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

*Sumber:( Wayan Cipta 2014)*

### 3. Rasio Efektivitas

Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (*cost of outcome*). Mardiasmo, (2009) menjelaskan rumus untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

**Tabel 3. 3**  
**Kriteria Efektivitas**

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber:( Wayan Cipta 2014)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pemerintah Kab/Kota di Tana Luwu yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kab/Kota di Tana Luwu maka diharapkan mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Tana Luwu. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Tana Luwu, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

##### **4.1.1 Kabupaten Luwu**

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kab. Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Kabupaten Luwu yang beribukota di Belopa memiliki luas 3.000,25 Km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 227 Desa/Kelurahan dan 21 Kecamatan.

Komoditi unggulan Kabupaten Luwu yaitu sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Sektor Perkebunan komoditi unggulannya adalah Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Kelapa, Cengkeh, Jambu Allot, Kemiri, Lada, Pala, Sagu, dan Vanili. Sub sektor Pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung, Tembakau dan Ubi kayu. Sub sektor jasa Pariwisataanya yaitu wisata alam dan budaya. Tentunya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki tentu berdampak pada perekonomian

masyarakat luwu yang apabila dikelola dengan baik akan dapat mensejahterkan masyarakat.

### 1. Rasio Ekonomis

Ekonomi berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Mardiasmo, (2009) menjelaskan rumus untuk mengukur tingkat ekonomis :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria Ekonomis kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan :

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber:( Wayan Cipta 2014)

Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu tahun 2016 sampai 2020 sebagai Berikut :

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 1.276.603.640.294.00}{\text{Rp } 1.346.697.837.368.10} \times 100 \% = 94.79 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 1,046,845,487,401.00}{\text{Rp } 1,070,471,507,319.49} \times 100 \% = 97.79 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 1,092,560,683,991.39}{\text{Rp } 1,127,985,354,232.09} \times 100 \% = 96.85 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 1,175,958,066,703.00}{\text{Rp } 1,219,599,863,687.15} \times 100 \% = 96.42 \%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 1,155,885,920,472.30}{\text{Rp } 1,225,939,130,948.00} \times 100 \% = 94.28 \%$$

Pengukuran Kinerja ekonomi dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4. 1**  
**Rasio Ekonomis Kabupaten Luwu**

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Ekonomis	Keterangan
2016	1,346,697,837,368.10	1,276,603,640,294.00	94.79 %	Ekonomis
2017	1,070,471,507,319.49	1,046,845,487,401.00	97.79 %	Ekonomis
2018	1,127,985,354,232.09	1,092,560,683,991.39	96.85 %	Ekonomis
2019	1,219,599,863,687.15	1,175,958,066,703.00	96.42 %	Ekonomis
2020	1,225,939,130,948.00	1,155,885,920,472.30	94.28 %	Ekonomis

*Sumber : (Data diolah)*

Dimana tahun 2016 rasio ekonomis kab. Luwu sebesar 94.79 % yang termasuk dalam kategori ekonomis karena berada di antara 90%-100%, untuk tahun 2017 juga masih dalam kategori ekonomis sebesar 97.79% naik 3% dari tahun 2016, untuk tahun 2018 masih dalam kategori ekonomis yaitu sebesar 96.85% mengalami penurunan dari tahun 2017, pada tahun 2019 rasio ekonomis kabupaten luwu juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tetapi masih dalam kategori ekonomis sebesar 96.42%, dan pada tahun 2020 juga rasio ekonomis sebesar 94.28% diaman juga menagalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dimana dapat dilihat dari 5 tahun terakhir kinerja keuangan pemerintah kab.luwu dilihat dari sisi ekonomis masih dalam kategori ekonomis, tingkat ekonomis tertinggi kabupaten luwu tertinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar 97.79% artinya penghematan belanja yang di lakukan kab. Luwu pada tahun ini

sangat ekonomis dari 5 tahun terakhir, walaupun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan hal ini dapat menunjukkan bahwa penghematan dalam belanja daerah mengalami penurunan walaupun masih tergolong ekonomis

## 2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan komponen dari konsep *Value For Money*, efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo, 2009).

Mardiasmo, (2009) menjelaskan rasio Efisiensi dapat di hitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria Efisiensi kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan:

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60 - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber:( Wayan Cipta 2014)

Kinerja pemerintah daerah kabupaten Luwu pada tahun 2016 sampai tahun 2020

berdasarkan rasio efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 1.276.603.640.294.00}{\text{Rp } 1,397,284,611,385.39} \times 100 \% = 91.36 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 1,046,845,487,401.00}{\text{Rp } 1,292,583,077,131.60} \times 100 \% = 80.98 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 1,092,560,683,991.39}{\text{Rp } 1,323,121,884,246.45} \times 100 \% = 82.57 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 1,175,958,066,703.00}{\text{Rp } 1,473,541,520,417.36} \times 100 \% = 79.80 \%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 1,155,885,920,472.30}{\text{Rp } 1,451,964,727,852.71} \times 100 \% = 79.60 \%$$

**Tabel 4. 2**  
**Rasio Efisiensi Kabupaten Luwu**

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Efisiensi	Keterangan
2016	1,397,284,611,385.39	1,276,603,640,294.00	91.36 %	Kurang Efisien
2017	1,292,583,077,131.60	1,046,845,487,401.00	80.98 %	Cukup Efisien
2018	1,323,121,884,246.45	1,092,560,683,991.39	82.57 %	Cukup Efisien
2019	1,473,541,520,417.36	1,175,958,066,703.00	79.80 %	Efisien
2020	1,451,964,727,852.71	1,155,885,920,472.30	79.60 %	Efisien

*Sumber : (Data diolah)*

Dari tabel diatas bisa kita lihat pada tahun 2016 rasio efisiensi sebesar 91.36% berada pada kategori kurang efisien karena berada pada kisaran 90-100% selanjutnya pada tahun 2017 turun sebesar 80.98% sehingga berada pada kategori cukup efisien juga pada tahun 2018 mengalami kenaikan tetapi masih berada pada kategori cukup efisien dan pada tahun 2019 dan 2020 turun dan masuk dalam kategori efisien

Dari keterangan diatas dapat di simpulkan bahwa untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2016-2020 dilihat dari rasio efisiensi mengalami penurunan hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan daerah kab. Luwu mengalami peningkatan karena kurangnya atau

efesiennya belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah ka. Luwu.

Menurut Mardiasmo (2013), yang menyatakan dengan semakin rendahnya rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah dalam kinerjanya semakin baik.

### 3. Rasio Efektivitas

Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (*cost of outcome*). Mardiasmo, (2009) menjelaskan rumus untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria Efektivitas kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber:( Wayan Cipta 2014)

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Luwu pada tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan rasio efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 1,397,284,611,385.39}{\text{Rp } 1,407,134,199,113.00} \times 100 \% = 99.30 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 1,292,583,077,131.60}{\text{Rp } 1,283,399,539,380.00} \times 100 \% = 100.71 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 1,323,121,884,246.45}{\text{Rp } 1,340,510,284,241.00} \times 100 \% = 98.70 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 1,473,541,520,417.36}{\text{Rp } 1,479,114,654,608.00} \times 100 \% = 99.62 \%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 1,451,964,727,852.71}{\text{Rp } 1,452,458,851,988.00} \times 100 \% = 99.96 \%$$

**Tabel 4. 3**  
**Rasio Efektivitas Kabupaten Luwu**

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Anggaran Pendapatan Daerah	Rasio Efektivitas	Keterangan
2016	1,397,284,611,385.39	1,407,134,199,113.00	99.30 %	Efektif
2017	1,292,583,077,131.60	1,283,399,539,380.00	100.71 %	Sangat Efektif
2018	1,323,121,884,246.45	1,340,510,284,241.00	98.70 %	Efektif
2019	1,473,541,520,417.36	1,479,114,654,608.00	99.62 %	Efektif
2020	1,451,964,727,852.71	1,452,458,851,988.00	99.96 %	Efektif

*Sumber : (Data diolah)*

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa rasio efektivitas kab. Luwu 5 tahun terakhir dari tahun 2016 rasio efektivitasnya sebesar 99% masuk kategori efisien karena berada pada kisaran 99-100% dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 100.71% dan itu berada pada kategori yang sangat efektif karena berada diatas 100% kemudian tahun 2018 mengalami penurunan tetapi masih efektif sebesar 98% dan naik lagi pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 99% yang artinya efektif.

Dari data diatas dan penjelasannya dapat kita simpulkan bahwa untuk anggaran pendapatan setiap tahunnya dapat di realisasikan setiap tahunnya terbilang efektif dan pada tahun 2017 sangat efektif artinya kinerja pemerintah daerah kab. Luwu sangat baik dalam merealisasikan pendapatan. Menurut Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa untuk rasio efektivitas merupakan tingkat

dari pencapaian atas apa yang telah ditetapkan. Dengan semakin tinggi rasio efektivitas itu mengindikasikan kemampuan daerah yang sangat efektif.

#### 4.1.2 Kota Palopo

Kota Palopo adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002.

#### 1. Rasio Ekonomis

Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah kota Palopo tahun 2016 sampai 2020 sebagai Berikut :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria Ekonomis kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan :

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber:( Wayan Cipta 2014)

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 1.045.044.740.745,20}{\text{Rp } 1.149.130.774.704,00} \times 100 \% = 90.94 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 963.855.112.821,04}{\text{Rp } 1.015.794.198.014,00} \times 100 \% = 94.88 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 982.922.627.365,89}{\text{Rp } 1.020.380.935.465,00} \times 100 \% = 96.32 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 956.451.857.030,35}{\text{Rp } 1.008.057.603.046,00} \times 100 \% = 94.88 \%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 943.885.796.203,19}{\text{Rp } 1.094.240.116.346,00} \times 100 \% = 86.25 \%$$

Pengukuran Kinerja ekonomi dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4. 4**  
**Rasio Ekonomis Kota Palopo**

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Ekonomis	Keterangan
2016	1.149.130.774.704,00	1.045.044.740.745,20	90.94 %	Ekonomis
2017	1.015.794.198.014,00	963.855.112.821,04	94.88 %	Ekonomis
2018	1.020.380.935.465,00	982.922.627.365,89	96.32 %	Ekonomis
2019	1.008.057.603.046,00	956.451.857.030,35	94.88 %	Ekonomis
2020	1.094.240.116.346,00	943.885.796.203,19	86.25 %	Cukup Ekonomis

*Sumber : (Data diolah)*

Dilihat dari table diatas maka untuk rasio ekonomis pemerintah kota palopo yang di ukur dalam 5 tahun, Pada tahun 2016 rasio ekonomis kota palopo sebesar 90.94% dimana masih dalam kategori ekonomis, pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 94.88% dan pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 96.32% artinya dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup baik lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 94.88% walaupun masih dalam kategori ekonomis karena masih berada di kisaran antara 90-100% dan pada tahun 2020 mengalami penurun yang cukup drastic sebesar 86.25% dimana pada tahun ini berada pada kategori cukup ekonomis karena berada di kisaran 80-90% .

Untuk target belanja daerah dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan,

yang juga diikuti tingkat biaya belanja daerah mengalami penurunan. hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio ekonomi pada tahun 2016-2018 atas pemerintah daerah yang mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya rasio ekonomi pemerintah daerah, menunjukkan bahwa penghematan dalam belanja pemerintah daerah mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang artinya pada tahun 2019 penghematan belanja daerah mengalami penurunan tetapi masih kategori ekonomis dan pada tahun 2020 pemerintah daerah kota palopo mengalami penurunan rasio ekonomis yang artinya penghematan belanja daerah semakin menurun dan termaksud dalam kategori cukup ekonomis karena berda pada kisaran 80-90%.

## 2. Rasio Efisiensi

Kinerja pemerintah daerah kota Palopo pada tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan rasio efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria Efisiensi kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan:

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60 - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber:( Wayan Cipta 2014)

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 1.004.346.574.517,06}{\text{Rp } 1.045.044.740.745,20} \times 100 \% = 96.10 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 934.121.533.937,22}{\text{Rp } 963.855.112.821,04} \times 100 \% = 96.91 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 964.783.951.705,73}{\text{Rp } 982.922.627.365,89} \times 100 \% = 98.15 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 984.500.257.290,51}{\text{Rp } 956.451.857.030,35} \times 100 \% = 102.93 \%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 969.408.934.593,27}{\text{Rp } 943.885.796.203,19} \times 100 \% = 102.70 \%$$

Pengukuran Kinerja Efisien dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4. 5**  
**Rasio Efisiensi Kota Palopo**

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Efisiensi	Keterangan
2016	1.004.346.574.517,06	1.045.044.740.745,20	96.10 %	Kurang Efisien
2017	934.121.533.937,22	963.855.112.821,04	96.91 %	Kurang Efisien
2018	964.783.951.705,73	982.922.627.365,89	98.15 %	Kurang Efisien
2019	984.500.257.290,51	956.451.857.030,35	102.93 %	Tidak Efisien
2020	969.408.934.593,27	943.885.796.203,19	102.70 %	Tidak Efisien

*Sumber : (Data diolah)*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa rasio efisiensi kota palopo pada tahun 2016 sebesar 96% yang berada pada kategori kurang efisien karena berada pada kisaran 90-100% begitu juga pada tahun 2017 dan tahun 2018 dimana masih belum mengalami kemajuan karena masih dalam kategori kurang efisien lalu pada tahun 2019 dan 2020 rasio efisiensi kota palopo meningkat diatas 100% yang berada pada kategori tidak efisien sebesar 102% pada tahun 2019 dan 2020.

Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa

belanja daerah untuk memperoleh pendapatan daerah pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Hal ini tidak baik bagi pemerintah kota palopo,. Dengan meningkatnya rasio efesiensi hal ini dapat menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan karena besarnya belanja yang di keluarkan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang artinya tidak efesiensi karena semakin tingginya rasio efesiensi suatu daerah menggambarkan bahwa kemampuan kierja pemerintah semakin tidak baik.

### 3. Rasio Efektivitas

Kinerja pemerintah daerah kota Palopo pada tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria Efektivitas kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber:( Wayan Cipta 2014)

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 1.004.346.574.517,06}{\text{Rp } 1.049.416.566.106,00} \times 100 \% = 95.70 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 934.121.533.937,22}{\text{Rp } 965.224.397.122,00} \times 100 \% = 96.77 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 964.783.951.705,73}{\text{Rp } 1.001.107.733.585,00} \times 100 \% = 94.57 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 984.500.257.290,51}{\text{Rp } 1.005.856.128.898,00} \times 100 \% = 97.87 \%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 969.408.934.593,27}{\text{Rp } 969.562.250.067,00} \times 100 \% = 99.98 \%$$

Pengukuran Kinerja Efektivitas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4. 6**  
**Rasio Efektivitas Kota Palopo**

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Anggaran Pendapatan Daerah	Rasio Efektivitas	Keterangan
2016	1.004.346.574.517,06	1.049.416.566.106,00	95.70 %	Efektif
2017	934.121.533.937,22	965.224.397.122,00	96.77 %	Efektif
2018	964.783.951.705,73	1.001.107.733.585,00	94.57 %	Efektif
2019	984.500.257.290,51	1.005.856.128.898,00	97.87 %	Efektif
2020	969.408.934.593,27	969.562.250.067,00	99.98 %	Efektif

*Sumber : (Data diolah)*

Dari tabel diatas dapat kita lihat pada 5 tahun terakhir rasieo efektifitas kota palopo mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2016 sebesar 95% efektif karena berada apada kisarn 90-100% tahun 2017 mengali peningkatan sebesar 96% dan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 94% kemudian pada tahun 2019 naik lagi sebesar 97% mengalami naik dan turun dan tahun 2020 naik lagi sebesar 99% semuanya berada pada kategori efesien

Dari penjelasan dan data diatas dapat kita simpulkan bahwa rasio efektifitas kota palopo mengalami naik dan turun tetapi berada pada kategori

efektif artinya anggaran yang dianggarkan dapat di realisasikan dengan efektif dengan begitu kinerja pemerintah daerah kota palopo mengalami ke stabilan dari sisi efektifitas setiap tahunnya.

#### 4.1.3 Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2019, berjumlah 300.374 jiwa. Kabupaten ini terdiri atas 11 Kecamatan yakni Kecamatan Malili, kecamatan Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Burau dan Mangkutana.

#### 1. Rasio Ekonomis

Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah kab. Luwu Timur tahun 2016 sampai 2020 sebagai Berikut :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria Ekonomis kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan :

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber:( Wayan Cipta 2014)

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 1.217.894.760.195,35}{\text{Rp } 1.396.629.434.484,64} \times 100 \% = 87.20 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 1.234.081.560.969,24}{\text{Rp } 1.361.173.908.749,00} \times 100 \% = 90.66 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 1.332.027.179.486,57}{\text{Rp } 1.406.305.162.231,95} \times 100 \% = 94.71 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 1.309.579.639.778,14}{\text{Rp } 1.398.246.682.498,42} \times 100 \% = 93.65 \%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 1.224.717.801.721,05}{\text{Rp } 1.271.960.533.828,78} \times 100 \% = 96.28 \%$$

Pengukuran Kinerja ekonomi dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4. 7**  
**Rasio Ekonomis Kabupaten Luwu Timur**

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Ekonomis	Keterangan
2016	1.396.629.434.484,64	1.217.894.760.195,35	87.20 %	Cukup Ekonomis
2017	1.361.173.908.749,00	1.234.081.560.969,24	90.66 %	Ekonomis
2018	1.406.305.162.231,95	1.332.027.179.486,57	94.71 %	Ekonomis
2019	1.398.246.682.498,42	1.309.579.639.778,14	93.65 %	Ekonomis
2020	1.271.960.533.828,78	1.224.717.801.721,05	96.28 %	Ekonomis

*Sumber : (Data diolah)*

Dilihat dari tabel diatas maka untuk rasio ekonomis pemerintah kab. Luwu Timur yang di ukur dalam 5 tahun, dimana pada tahun 2016 rasio ekonomis sebesar 87.20% cukup ekonomis karena berada pada kisaran 80-90%, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 90.66% yang berate ekonomis pada tahun 2018 rasio ekonomis sebesar 94.71%, pada tahun 2019 mengalami penurunan walupun

tidak banyak sebesar 93.65% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi sebesar 96.28% yang termaksud dalam kategori ekonomis

Dapat di simpulkan bahwa 5 tahun terakhir rasio ekonomis kab. Luwu Timur mengalami peningkatan dan penurunan pengehamatan belanja daerah pada tahun 2016 merupakan tahun dimana pemerintah daerah kab. Luwu timur kurang mampu dalam penghematan belanja daerah paling rendah dari 4 tahun berikutnya walupun mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2018 dan turun lagi pada 2019 tetapi masih stabil dan pada 2020 mengalami peningkatan dalam penghematan belanja daerah.

## 2. Rasio Efisiensi

Kinerja pemerintah daerah Kab. Luwu Timur pada tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan rasio efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria Efisiensi kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan:

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60 - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber:( Wayan Cipta 2014)

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 1.217.894.760.195,35}{\text{Rp } 1.414.058.832.306,66} \times 100 \% = 86.12 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 1.234.081.560.969,24}{\text{Rp } 1.365.172.782.139,53} \times 100 \% = 90.39 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 1.332.027.179.486,57}{\text{Rp } 1.466.152.959.823,12} \times 100 \% = 90.85 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 1.309.579.639.778,14}{\text{Rp } 1.513.997.519.184,08} \times 100 \% = 86.49 \%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 1.224.717.801.721,05}{\text{Rp } 1.495.670.435.578,65} \times 100 \% = 81.88 \%$$

Pengukuran Kinerja Efisien dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4. 8**  
**Rasio Efisiensi Kabupaten Luwu Timur**

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Efisiensi	Keterangan
2016	1.414.058.832.306,66	1.217.894.760.195,35	86.12 %	Cukup Efisien
2017	1.365.172.782.139,53	1.234.081.560.969,24	90.39 %	Kurang Efisien
2018	1.466.152.959.823,12	1.332.027.179.486,57	90.85 %	Kurang Efisien
2019	1.513.997.519.184,08	1.309.579.639.778,14	86.49 %	Cukup Efisien
2020	1.495.670.435.578,65	1.224.717.801.721,05	81.88 %	Cukup Efisien

*Sumber : (Data diolah)*

Dari tabel di atas bisa kita lihat bahwa pada 5 tahun terakhir rasio efisiensi Kab.

Luwu Timur mengalami penurunan dan peningkatan pada tahun 2016 sebesar 86% yang mengindikasikan cukup efisien dan pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan sebesar 90% yang berarti kurang efisien karena berada pada kisaran 90-100% dan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 86% pada tahun 2019 dan turun lagi 81% pada tahun 2020 tetapi masih dalam kategori cukup efisien.

Dari 5 tahun data diatas dapat kita lihat bahwa belanja daerah untuk mendapatkan pendapatan daerah se efisien mungkin mengalami peningkatan dan penurunan tentunya berdampak kurang baik bagi pemerintah kab. Luwu Timur, karena kurang efesiennya perintah daerah luwu timur dalam belanja daerah untuk memperoleh pendapatan.

### 3. Rasio Efektivitas

Kinerja pemerintah daerah kab. Luwu Timur pada tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria Efektivitas kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber:( Wayan Cipta 2014)

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 1.414.058.832.306,66}{\text{Rp } 1.436.866.872.462,00} \times 100 \% = 98.41 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 1.365.172.782.139,53}{\text{Rp } 1.388.302.389.435,00} \times 100 \% = 98.33 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 1.466.152.959.823,12}{\text{Rp } 1.493.024.683.089,90} \times 100 \% = 98.20 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 1.513.997.519.184,08}{\text{Rp } 1.576.504.544.799,42} \times 100 \% = 96.03 \%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 1.495.670.435.578,65}{\text{Rp } 1.470.081.947.079,13} \times 100 \% = 101.74 \%$$

Pengukuran Kinerja Efektivitas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4. 9**  
**Rasio Efektivitas Kabupaten Luwu Timur**

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Anggaran Pendapatan Daerah	Rasio Efektivitas	Keterangan
2016	1.414.058.832.306,66	1.436.866.872.462,00	98.41 %	Efektif
2017	1.365.172.782.139,53	1.388.302.389.435,00	98.33 %	Efektif
2018	1.466.152.959.823,12	1.493.024.683.089,90	98.20 %	Efektif
2019	1.513.997.519.184,08	1.576.504.544.799,42	96.03 %	Efektif
2020	1.495.670.435.578,65	1.470.081.947.079,13	101.74 %	Sangat Efektif

*Sumber : (Data diolah)*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa tabel efektifitas Kab. Luwu Timur 5 tahun terakhir terbilang stabil dimana dari tahun 2016-2018 rasio efektifitasnya sebesar 98% masuk dalam kategori efektif karena berada pada kategori 90-100% walaupun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019 sebesar 96% tetapi masih dalam kategori efektif dan pada tahun 2020 naik lagi melebihi 100% yaitu artinya berada pada kategori yang sangat efisien.

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa pemerintah daerah Kab. Luwu Timur 5 tahun terakhir sangat efektif dalam mengelola pendapatan daerah karena besarnya anggaran daerah yang di rencanakan dapat di realisasikan dengan se efektif mungkin dan juga terbilang stabil karena 4 tahun terakhir masuk

kategori efektif dan pada tahun 2020 naik lagi di atas 100% yang masuk kategori sangat efektif.

#### 4.1.4 Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 450.000 jiwa. Namun setelah dimekarkan kembali dengan membentuk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2003 maka saat ini luas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7.502,58 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 312.883 jiwa (2019).

#### 1. Rasio Ekonomis

Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah kab. Luwu Utara tahun 2016 sampai 2020 sebagai Berikut :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria Ekonomis kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan :

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber:( Wayan Cipta 2014)

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 1,174,311,916,018.66}{\text{Rp } 1,315,650,386,560.89} \times 100 \% = 89.25 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 1,225,292,194,250.88}{\text{Rp } 1,256,797,166,871.40} \times 100 \% = 97.49 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 1,287,973,455,878.00}{\text{Rp } 1,317,334,054,805.73} \times 100 \% = 97.77 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 1,377,928,248,881.01}{\text{Rp } 1,425,186,537,118.25} \times 100 \% = 96.68 \%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 1,363,537,853,082.88}{\text{Rp } 1,420,570,189,293.37} \times 100 \% = 95.98 \%$$

Pengukuran Kinerja ekonomi dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4. 10**  
**Rasio Ekonomis Kabupaten Luwu Utara**

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Ekonomis	Keterangan
2016	1,315,650,386,560.89	1,174,311,916,018.66	89.25 %	Cukup Ekonomis
2017	1,256,797,166,871.40	1,225,292,194,250.88	97.49 %	Ekonomis
2018	1,317,334,054,805.73	1,287,973,455,878.00	97.77 %	Ekonomis
2019	1,425,186,537,118.25	1,377,928,248,881.01	96.68 %	Ekonomis
2020	1,420,570,189,293.37	1,363,537,853,082.88	95.98 %	Ekonomis

*Sumber : (Data diolah)*

Dilihat dari table diatas pada tahun 2016 rasio ekonomis Kab. Luwu Utara sebesar 89.25% termaksud alam kategori cukup ekonomis karena berada pada kisaran 80-90% pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup naik sebesar 97.49% berada dalam kategori ekonomis pada tahun 2018 sebesar 97.77% sama dengan

tahun 2017 pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 96.68% dan juga pada tahun 2020 sebesar 2020 dan masih dalam kategori ekonomis

Dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2016 pemerintah daerah kab.luwu timur kurang mampu dalam menghemat belanja daerah tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 mengalami peningkatan penghematan belanja daerah yang sangat baik sehingga berada pada kisaran 97% dan terbilang stabil sampai tahun 2020 walaupun mengalami sedikit penurunan.

## 2. Rasio Efisiensi

Kinerja pemerintah daerah Kab. Luwu Utara pada tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan rasio efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria Efisiensi kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan:

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60 - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber:( Wayan Cipta 2014)

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 1,174,311,916,018.66}{\text{Rp } 1,188,648,375,738.64} \times 100 \% = 98.79 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 1,225,292,194,250.88}{\text{Rp } 1,211,177,536,155.31} \times 100 \% = 101.16 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 1,287,973,455,878.00}{\text{Rp } 1,282,825,003,353.81} \times 100 \% = 100.40 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 1,377,928,248,881.01}{\text{Rp } 1,384,294,895,858.42} \times 100 \% = 99.54 \%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 1,363,537,853,082.88}{\text{Rp } 1,356,570,144,321.36} \times 100 \% = 100.51 \%$$

Pengukuran Kinerja efisiensi dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4. 11**  
**Rasio Efisiensi Kabupaten Luwu Utara**

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Efisiensi	Keterangan
2016	1,188,648,375,738.64	1,174,311,916,018.66	98.79 %	Kurang Efisien
2017	1,211,177,536,155.31	1,225,292,194,250.88	101.16 %	Tidak Efisien
2018	1,282,825,003,353.81	1,287,973,455,878.00	100.40 %	Tidak Efisien
2019	1,384,294,895,858.42	1,377,928,248,881.01	99.54 %	Kurang Efisien
2020	1,356,570,144,321.36	1,363,537,853,082.88	100.51 %	Tidak Efisien

Sumber : (Data diolah)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa rasio efisiensi kab. Luwu Utara mengalami peningkatan dan penurunan walapun tidak signifikan pada tahun 2016 sebesar 98% dalam kategori kurang efisien dan pada tahun 2017 dan 2018 berada pada kategori tidak efisien karena berada pada kisaran di atas 100% pada tahun 2019 turun sebesar 99% mendekati tidak efisien tetapi masih kurang efisien dan pada tahun 2020 naik lagi sebesar 100% yang mengindikasikan kurang efisien

Dari keterangan dan data diatas dapat kita simpulkan bahwa kab. Luwu utara dari sisi efisiensi penggunaan belanja daerah untuk mendapatkan

pendapatan daerah 5 tahun terakhir mengalami naik turun hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kab. Luwu kurang baik dilihat dari sisi efisiensi karena besarnya belanja daerah yang di keluarkan tidak efisien dengan pendapatan yang di dapatkan karena semakin tinggi rasio efisiensi Kab. Luwu Utara menggambarkan kinerja perintah dari sisi efisiensi kurang baik.

### 3. Rasio Efektivitas

Kinerja pemerintah daerah kab. Luwu utara pada tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria Efektivitas kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber:( Wayan Cipta 2014)

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 1,188,648,375,738.64}{\text{Rp } 1,287,870,000,000.00} \times 100 \% = 92.29 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 1,211,177,536,155.31}{\text{Rp } 1,219,242,459,063.40} \times 100 \% = 99.33 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 1,282,825,003,353.81}{\text{Rp } 1,305,484,941,000.00} \times 100 \% = 98.26 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 1,384,294,895,858.42}{\text{Rp } 1,421,917,779,000.00} \times 100 \% = 97.35 \%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 1,356,570,144,321.36}{\text{Rp } 1,411,893,864,636.00} \times 100 \% = 96.08 \%$$

Pengukuran Kinerja efektivitas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4. 12**  
**Rasio Efektivitas Kabupaten Luwu Utara**

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Anggaran Pendapatan Daerah	Rasio Efektivitas	Keterangan
2016	1,188,648,375,738.64	1,287,870,000,000.00	92.29 %	Efektif
2017	1,211,177,536,155.31	1,219,242,459,063.40	99.33 %	Efektif
2018	1,282,825,003,353.81	1,305,484,941,000.00	98.26 %	Efektif
2019	1,384,294,895,858.42	1,421,917,779,000.00	97.35 %	Efektif
2020	1,356,570,144,321.36	1,411,893,864,636.00	96.08 %	Efektif

*Sumber : (Data diolah)*

Dari tabel diatas bisa kita lihat rasio efektivitas kab. Luwu Utara 5 tahun terakhir pada tahun 2016 sebesar 92% masuk kategori efektif karena berada pada kisaran 90-100% dan pada tahun 2017 juga masih dalam kategori efektif sebesar 99% mengalami peningkatan pada tahun 2016, pada tahun 2018 sebesar 98.26% turun sedikit dari tahun sebelumnya dan tahun 2019 dan 2020 juga mengalami penurunan tetapi msih efektif

Dari penjelasan dan data diatas dapat kita lihat 5 tahun terakhir kab luwu utara dari sisi efektivitas terbilang stabil karena dalam kategori efektif artinya

untuk realisasi pendapatan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan anggaran yang direncanakan dapat di realisasikan secara efektif dengan meningkatnya rasio efektifitas mengindikasikan semakin baik kinerja dan efektif suatu daerah.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Tana Luwu penelitian yang di ukur melalui konsep *value for money* adalah :

1. Kinerja pemerintah daerah kab. Luwu yang di ukur dengan metode *value for money* yang di ukur dengan rasio :
  - a. Ekonomis untuk target belanja daerah dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan, yang juga diikuti tingkat biaya belanja daerah mengalami penurunan. hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio ekonomi pada tahun 2016-2018 atas pemerintah daerah yang mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya rasio ekonomi pemerintah daerah, menunjukkan bahwa penghematan dalam belanja pemerintah daerah mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang artinya pada tahun 2019 penghematan belanja daerah mengalami penurunan tetapi masih kategori ekonomis dan pada tahun 2020 pemerintah daerah kota palopo mengalami penurunan rasio ekonomis yang artinya pennghematan belanja daerah semakin menurun.
  - b. Efisiensi untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2016-2020 dilihat dari rasio efisiensi mengalami penurunan hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan daerah kab. Luwu mengalami peningkatan karena kurangnya atau efesiennya belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah ka. Luwu.

- c. Efektivitas untuk anggaran pendapatan setiap tahunnya dapat di realisasikan setiap tahunnya terbilang efektif dan pada tahun 2017 sangat efektif artinya kinerja pemerintah daerah kab. Luwu sangat baik dalam merealisasikan pendapatan.
2. Kinerja pemerintah daerah kota palopo yang di ukur dengan metode *value for money* yang di ukur dengan rasio :
  - a. Ekonomis pada tahun 2016-2018 atas pemerintah daerah yang mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya rasio ekonomi pemerintah daerah, menunjukkan bahwa penghematan dalam belanja pemerintah daerah mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang penghematan belanja daerah semakin menurun.
  - b. Efisiensi belanja daerah untuk memperoleh pendapatan daerah pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Hal ini tidak baik bagi pemerintah kota palopo,. Dengan meningkatnya rasio efisiensi hal ini dapat menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan karena besarnya belanja yang di keluarkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
  - c. Efektivitas kota palopo mengalami naik dan turun tetapi berada pada kategori efektif artinya anggaran yang dianggarkan dapat di realisasikan dengan efektif dengan begitu kinerja pemerintah daerah kota palopo mengalami ke stabilan dari sisi efektifitas setiap tahunnya.
3. Kinerja pemerintah daerah kab. Luwu timur yang di ukur dengan metode *value for money* yang di ukur dengan rasio :

- a. Ekonomis kab. luwu timur mengalami peningkatan dan penurunan penghematan belanja daerah pada tahun 2016 merupakan tahun dimana pemerintah daerah kab. Luwu timur kurang mampu dalam penghematan belanja daerah paling rendah dari 4 tahun berikutnya walupun mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2018 dan turun lagi pada 2019 tetapi masih stabil dan pada 2020 mengalami peningkatan dalam penghematan belanja daerah.
  - b. Efisiensi Dari 5 tahun dapat kita lihat bahwa belanja daerah untuk mendapatkan pendapatan daerah se-efisien mungkin mengalami peningkatan dan penurunan tentunya berdampak kurang baik bagi pemerintah kab. Luwu timur, karena kurang efesiennya perintah daerah luwu timur dalam belanja daerah untuk memperoleh pendapatan.
  - c. Efektivitas pemerintah daerah kab. Luwu timur 5 tahun terakhir sangat efektif dalam mengelola pendapatan daerah karena besarnya anggaran daerah yang di rencanakan dapat di realisasikan dengan se efektif mungkin dan juga terbilang stabil karena 4 tahun terakhir masuk kategori efektif dan pada tahun 2020 naik lagi di atas 100% yang masuk kategori sangat efektif.
4. Kinerja pemerintah daerah kab. Luwu utara yang di ukur dengan metode *value for money* yang di ukur dengan rasio :
- a. Ekonomis pada tahun 2016 pemerintah daerah kab.luwu timur kurang mampu dalam menghemat belanja daerah tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 mengalami peningkatan penghematan belanja daerah yang

sangat baik sehingga berada pada kisaran 97% dan terbilang stabil sampai tahun 2020 walaupun mengalami sedikit penurunan.

- b. Efisiensi, kab. Luwu utara dari sisi efisiensi penggunaan belanja daerah untuk mendapatkan pendapatan daerah 5 tahun terakhir mengalami naik turun hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kab. Luwu kurang baik dilihat dari sisi efisiensi karena besarnya belanja daerah yang dikeluarkan tidak efisien dengan pendapatan yang didapatkan karena semakin tinggi rasio efisiensi kab. Luwu utara menggambarkan kinerja pemerintah dari sisi efisiensi kurang baik.
- c. Efektivitas dapat kita lihat 5 tahun terakhir kab luwu utara dari sisi efektivitas terbilang stabil karena dalam kategori efektif artinya untuk realisasi pendapatan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan anggaran yang direncanakan dapat di realisasikan secara efektif dengan meningkatnya rasio efektifitas mengindikasikan semakin baik kinerja dan efektif suatu daerah.

## **5.2 Saran**

Adapun saran dan masukan untuk kab/kota se tana luwu agar kedepannya lebih baik lagi antara lain :

1. Bagi pemerintah kab/kota di tana luwu melakukan penghematan akan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga kinerja dari sisi ekonomis dapat di tingkatkan tahun-tahun berikutnya.
2. Untuk meningkatkan pendapatan daerah kab/kota di tana luwu harus meningkatkan SDM dan juga menegakkan peraturan tanpa memandang status sosial seseorang.

3. Di harapkan dapat menekan belanja-belanja daerah yang tidak begitu si perlukan dan meningkatkan pendapatan daerah agar dengan memanfaatkan SDA yang ada sehingga realisasi pendapatan dapat efisien.

## DAFTAR RUJUKAN

- AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK: (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan ... - Dito Aditia Darma Nasution - Google Buku.* (n.d.). Retrieved February 24, 2021, from [https://books.google.co.id/books?id=T\\_OmDwAAQB AJ&pg=PA200&dq=mardiasmo.+2009.+akuntansi+sektor+publik.+yogyakarta+andi+yogyakarta&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjz7ZT4voDvAhX9iOY KHZ9hDAUQ6AEwAXoECAMQAg#v=onepage&q=mardiasmo.2009.akuntansi.sektor.publik.yogyakarta.andi.yogyakarta&f=false](https://books.google.co.id/books?id=T_OmDwAAQB AJ&pg=PA200&dq=mardiasmo.+2009.+akuntansi+sektor+publik.+yogyakarta+andi+yogyakarta&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjz7ZT4voDvAhX9iOY KHZ9hDAUQ6AEwAXoECAMQAg#v=onepage&q=mardiasmo.2009.akuntansi.sektor.publik.yogyakarta.andi.yogyakarta&f=false)
- Ardila, L. (2008). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Ambiguitas Peran dan Asimetri Informasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 2–17.
- Arikunto, S. (2007). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Bayu, M., & Andre Santoso Sam. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. *Issn2620-5335*, 4(2), 466–487.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2009a). *akuntansi sektor publik*.
- Mardiasmo. (2009b). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: And.
- Mulyadi. (2004). *Akuntansi Manajemen, jilid 2*. STIE YKPN.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Perdana, T. A., Budiantoro, R. A., Ibnu, F., & Sukono, F. (2020). *Mengukur kinerja apbd kota surabaya analisis value for money Measuring the*

*performance of APBD in the city of Surabaya , analysis of value for money. 16(2), 339–346.*

Rahmawati, S. I. (2019). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 1–16.

Sari, Y. N. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value for Money ( Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Ase "\ Daerah Kota Medan ). *Skripsi*, 1–9.